

Judul Penelitian : Pengaruh Perlakuan Akuntansi Pajak atas Jasa Ekspedisi sesuai dengan PMK 141/PMK.03/2015 Terhadap Penentuan Pajak Terutang (Studi Kasus pada PT.Jawa Pratama Mandiri Cabang Gresik)
Dosen Pembimbing : Ninik Anggraini.SE,MSA,Ak,CA:Khasanah Sahara. SE,MSA
Nama Mahasiswa : Tia Fatmarini- NPM: 15.13031.0002

Abstraksi

Perlakuan akuntansi pajak atas jasa ekspedisi yang dasar penentuan pajaknya terutang PPN, hal ini yang menjadikan timbulnya utang pajak dan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa yang telah diberikan, yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Didalam penyusunan, perhitungan serta menentukan berapa besar Pajak Terutang pada laporan keuangan ada bagian-bagian dari perhitungan pajak tersebut yang sifatnya dapat dikreditkan pajak yang akan berpengaruh pada laba setelah pajak yang diterima oleh perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan akuntansi pajak atas jasa ekspedisi sesuai dengan PMK 141/ PMK.03/2015 terhadap penentuan Pajak Terutang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis data yang digunakan, data kualitatif dan data kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah Jasa Ekspedisi dan Pajak Terutang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang menjelaskan tentang variabel atau data dalam penelitian yang selanjutnya dilakukan perhitungan untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan Pajak Terutang dari perhitungan Kantor Pusat dengan Kantor Cabang, perhitungan Pajak Terutang yang dihitung dengan cara rekonsiliasi fiskal sesuai dengan Peraturan Perpajakan, pembebanan Pajak Terutang yang dihitung Kantor Pusat dengan perhitungan yang dilakukan pada Kantor Cabang menimbulkan selisih lebih besar perhitungan yang dihitung Kantor Pusat sehingga menyebabkan berkurangnya laba yang diperoleh Kantor Cabang. Kelemahan sistem yang digunakan pada perusahaan yang menyebabkan salah masuk pendapatan ke divisi lain. Pada akomodasi kendaraan untuk divisi paket menjadi satu dengan divisi *cargo* dalam hal pelayanan armada pengiriman barang, hal ini yang menyebabkan terjadinya salah memasukkan pendapatan dari divisi paket ke divisi *cargo*, yang menimbulkan berkurangnya pendapatan pada divisi paket.

Berdasarkan hasil penelitian, saran dari peneliti untuk perusahaan sebaiknya menghitung Pajak Terutang Kantor Cabang sendiri, lebih mengefisiensikan untuk sistem yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses input data, dan untuk akomodasi kendaraan divisi paket sebaiknya di pisahkan dengan kendaraan divisi *cargo*.

Kata kunci : Jasa Ekspedisi, Pajak Terutang